

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bemmelen, J.M. van. *Hukum Pidana*. diterjemahkan oleh Hasnan (Jakarta: Binacipta, 1984).
- Christiansen, Karl O. *Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*. Resource Material series No. 7 (Tokyo: UNAFEI, 1974).
- Cross, Sir Rupert dan Andrew Ashworth. *The English Sentencing System*. (London: Sui terworths, 1981).
- Departemen Kehakiman Indonesia. *Bacaan Bagi Kadarkum*. (Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1995).
- Direktorat Jendral Pemasarakatan Departemen Hukum dan Ham R.I., *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan*, 2009.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Pertama. (Jakarta: Yarsif Watampone, 2005).
- \_\_\_\_\_. *Sistem Pidanaan dan Pemidanaan di Indonesia*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Cetakan Ke-2. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. *Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Kejaksaan RI. *Modul Asas-asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Buku Diklat Pendahuluan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, 2010).
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2014).
- Lamintang, P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintag. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. *Hukum Penitensier Indonesia*. Edisi Kedua. Cetakan Pertama. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Pidana dan Penal*. (Semarang: Bahan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP, 1994).
- \_\_\_\_\_. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1984).
- Packer, Herbert L. *The Limits of The Criminal Sanction*. (California: Stanford University Press, 1968).
- Poernomo, Bambang. *Ancaman Pidana Mati dalam Hukum Pidana di Indonesia*. cetakan ke-1 (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Cetakan Keempat. (Jakarta: Aksara Baru, 1983).
- Sarwoko, Djoko. *Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2012).
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Soedirdjo. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. (Jakarta: CV Akademika Pressirido, 1985).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006).
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Balai Askara, 1985).
- Stroink, F.A.M. dalam Abdul Rasyid Thalib. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).
- Sudarto. *Hukum Pidana I*. (Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip, 1990).
- \_\_\_\_\_. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Cetakan ke 2. (Bandung: Alumni, 1986).
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Syarifin, Pipin. *Hukum Pidana di Indonesia*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Tim Redaksi. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acarapidana)*. (Yogyakarta: Katalog dalam Terbitan, 2014).

Waluyadi. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. (Bandung: Mandar Maju, 2004).

Wijaya, Firman. *Whistle Blower dan Justice Collaborator*. (Jakarta: Penaku, 2012).

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250).

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602)*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama*.

\_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.*

\_\_\_\_\_. *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.*

### **C. Kamus**

Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. (St. Paul Minn: West Publishing Co., 1979).

Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

Sudarsono. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2007).

### **D. Makalah /Jurnal**

Kantaprawira, Rusadi. "Hukum dan Kekuasaan". *Makalah*, (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 1998).

Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Anti Korupsi*. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016).

### **E. Internet**

Retaudari, Elza Astari. "Angie Kalau Tolak Perintah Nazaruddin Dilaporkan ke Mas Ibas". <https://news.detik.com/berita/3621640/angie-kalau-tolak-perintah-nazaruddin-dilaporkan-ke-mas-ibas>, diakses tanggal 28 Mei 2018.